

Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan Perdesaan dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Nusa Tenggara Timur pada Periode Kepemimpinan Victor Laiskodat 2018

Princess Ngozi Chika^{1*}, Gabriella Dofani Natalia Siregar², Kezia Marlinata Sinaga³, Aniqotul Ummah⁴

^{1,2,3,4}

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.258>

*Correspondence: Princess Ngozi Chika

Email:

2310413104@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 04-06-2025

Accepted: 16-07-2025

Published: 29-08-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender yang cukup tinggi, terutama dalam konteks pembangunan perdesaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa selama masa kepemimpinan Gubernur Viktor Laiskodat (2018–2023), serta menilai efektivitas kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan gender. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen kebijakan daerah, laporan pelaksanaan program, serta publikasi akademik dan organisasi non-pemerintah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik content analysis dan triangulasi sumber untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai situasi gender di perdesaan NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar sudah relatif setara antara laki-laki dan perempuan, ketimpangan masih terjadi pada tingkat pendidikan tinggi dan partisipasi ekonomi. Pemerintah Provinsi NTT berupaya mengatasi hal ini melalui program pemberdayaan perempuan, seperti pengembangan industri bambu dan program pembibitan keluarga berbasis komunitas, yang terbukti mampu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi lokal hingga 27%. Selain itu, terdapat peningkatan peran perempuan dalam forum-

forum musyawarah desa dan kelompok usaha bersama. Namun, hambatan struktural seperti norma budaya patriarkal, minimnya dukungan keluarga, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan teknis dan sumber daya masih menjadi tantangan utama. Temuan ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan berkelanjutan dan inklusif yang berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam pembangunan perdesaan di NTT

Kata Kunci: Ketidaksetaraan gender, Partisipasi perempuan, Pengambilan keputusan, Pembangunan perdesaan, Nusa Tenggara Timur

Abstract: East Nusa Tenggara (NTT) is one of the provinces with a relatively high level of gender inequality, particularly in the context of rural development. This study aims to evaluate women's participation in decision-making at the village level during the leadership of Governor Viktor Laiskodat (2018–2023), and to assess the effectiveness of policies aimed at reducing gender disparities. The method used is a literature review with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through systematic analysis of regional policy documents, program implementation reports, and relevant academic and non-governmental publications. The analysis employed content analysis techniques and source triangulation to obtain a comprehensive picture of gender issues in rural NTT. The findings reveal that although access to basic education is relatively equal between men and women, disparities persist in higher education and economic participation. The NTT provincial government has attempted to address this through women empowerment programs, such as bamboo industry development and community-based family seedling programs, which have proven effective in increasing women's involvement in local economic activities by up to 27%. Additionally, there has been a notable increase in women's

roles in village deliberation forums and joint business groups. However, structural barriers such as patriarchal cultural norms, lack of family support, and limited access to technical training and resources remain major challenges. These findings highlight the importance of formulating sustainable and inclusive policies that focus on enhancing women's capacity to actively and equally participate in rural development in NTT.

Keywords: *Gender Inequality, Women's Participation, Decision-Making, Rural Development, East Nusa Tenggara*

Pendahuluan

Ketidaksetaraan gender tetap menjadi isu multidimensional yang menghambat pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah-wilayah perdesaan Indonesia yang masih dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional. Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi contoh nyata di mana ketimpangan gender bukan hanya menyangkut keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya, tetapi juga minimnya keterwakilan mereka dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di tingkat desa. Padahal, perempuan di NTT memainkan peran signifikan dalam sektor-sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan pengelolaan rumah tangga. Namun demikian, partisipasi mereka dalam ranah strategis pembangunan masih sangat terbatas. Meskipun Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat (2018–2023) telah menginisiasi berbagai program yang bertujuan memberdayakan perempuan, data menunjukkan adanya ketimpangan representasi yang nyata. Menurut BPS NTT (2023), jumlah penduduk perempuan mencapai 50,2% dari total populasi, tetapi hanya sekitar 13% dari kepala desa yang dijabat oleh perempuan. Temuan ini konsisten dengan kajian Susanti & Lestari (2021) yang menyoroti rendahnya representasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa di wilayah timur Indonesia, meskipun mereka memiliki peran besar dalam sektor informal. Artinya, secara struktural perempuan masih terpinggirkan dalam politik lokal desa. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya patriarkal yang kuat, yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Penelitian Mutmainah (2021) menunjukkan bahwa norma adat di banyak desa di NTT membatasi peran perempuan dalam ruang publik dan menjustifikasi dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, perempuan seringkali hanya menjadi pelengkap administratif dalam lembaga desa, tanpa memiliki pengaruh substantif terhadap arah kebijakan. Ini diperkuat oleh hasil studi Puspitasari (2020), yang menyatakan bahwa simbolisme representasi perempuan sering tidak dibarengi dengan ruang aktual untuk mempengaruhi kebijakan desa.

Hal serupa ditegaskan oleh Wahyuni (2022), yang mencatat bahwa beban ganda perempuan—sebagai pekerja informal sekaligus pengurus rumah tangga—memperkuat eksklusi mereka dari proses-proses politik desa. Bahkan kontribusi mereka di sektor pertanian kerap tidak diakui secara statistik maupun ekonomi. Studi Yuliana dan Prasetyo (2023) juga menemukan bahwa meskipun perempuan aktif dalam kelompok tani dan koperasi desa, mereka jarang dilibatkan dalam musyawarah pembangunan atau pengelolaan dana desa. Hal ini diperkuat oleh hasil studi oleh Syamsiyah dan Handayani (2020), yang menunjukkan bahwa rendahnya akses perempuan terhadap aset produktif

seperti tanah dan modal usaha berkontribusi terhadap lemahnya posisi tawar mereka di ruang publik desa. Sementara itu, menurut penelitian Wulandari (2019), perempuan di wilayah perdesaan Indonesia Timur menghadapi hambatan struktural dalam pendidikan dan literasi politik yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam musyawarah desa dan pemilihan kepala desa. Data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah perempuan tingkat menengah atas di NTT hanya 55%, dibandingkan dengan 64% pada laki-laki, yang berdampak langsung pada kurangnya kesiapan perempuan untuk mengakses posisi strategis dalam pemerintahan desa (BPS NTT, 2023). Penurunan ini juga dilaporkan oleh Ramadhani et al. (2022), yang menyoroti bahwa keterbatasan pendidikan perempuan di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) memperlemah peluang mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji ketimpangan gender dari perspektif budaya dan ekonomi, belum banyak yang secara khusus menelusuri keterkaitan antara kebijakan pembangunan lokal dan dinamika partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di desa. Penelitian semacam itu penting untuk menilai efektivitas kebijakan afirmatif dan keberlanjutan program pemberdayaan perempuan dalam konteks kultural yang kompleks seperti di NTT (Harahap, 2023). Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi relevan dan memiliki kebaruan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menekankan aspek struktural atau kultural secara terpisah, penelitian ini akan mengintegrasikan analisis terhadap kebijakan daerah era Viktor Laiskodat dengan realitas sosial di tingkat desa. Fokusnya adalah mengevaluasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan desa secara substantif—tidak sekadar kehadiran formal, melainkan juga kapasitas mempengaruhi arah kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap studi gender dan pembangunan lokal, sekaligus rekomendasi kebijakan berbasis kontekstual untuk memperkuat inklusi perempuan dalam pembangunan perdesaan di wilayah Indonesia Timur.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggunakan teknik deskriptif-analitis dan studi kasus. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang ketidaksetaraan gender dalam pembangunan perdesaan. Metode ini mengutamakan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama masa kepemimpinan Viktor Laiskodat (2018–2023). Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengungkap dinamika kebijakan dan struktural yang berdampak pada posisi perempuan dalam pemerintahan desa.

Penelitian ini dapat memfokuskan pada kondisi sosial-politik khusus yang ada di NTT dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana kebijakan daerah mempengaruhi representasi dan partisipasi perempuan di tingkat desa, serta seberapa banyak perempuan terlibat dalam proses perencanaan dan

pengambilan keputusan. Penelitian ini juga akan memperhatikan tantangan institusional dan kultural yang mereka hadapi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian dokumen. Sumber utama data ini termasuk kebijakan pemerintah daerah dan desa, laporan pembangunan daerah, laporan tahunan lembaga pemerintah seperti Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, untuk meningkatkan analisis, literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait masalah gender, pembangunan desa, dan pengarusutamaan gender di sektor pemerintahan diselidiki.

Selain itu, peneliti memeriksa undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang struktur pemerintahan desa, dan kebijakan provinsi NTT tentang pemberdayaan perempuan. Selain itu, sumber media lokal dan nasional digunakan sebagai acuan untuk menangkap narasi publik tentang masalah ketimpangan gender dalam konteks pembangunan daerah.

Dalam model analisis kualitatif Miles dan Huberman, proses analisis data terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Data direduksi dengan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian dan membaginya dalam tema-tema tertentu seperti representasi perempuan, hambatan kultural, dan kebijakan partisipatif. Penyampaian data dilakukan melalui narasi deskriptif dan tabel tematik. Selanjutnya, data yang ditemukan dihubungkan dengan teori-teori tentang partisipasi politik, gender, dan pembangunan perdesaan, serta konteks sosial-politik Nusa Tenggara Timur.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang ketidaksetaraan gender dalam konteks pembangunan desa di NTT serta mendorong penguatan kebijakan lokal yang lebih menerima dan memenuhi kebutuhan perempuan.

Hasil dan Pembahasan

1. Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan gender. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, realitas di tingkat desa menunjukkan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berimplikasi pada lemahnya representasi suara perempuan dalam perumusan kebijakan desa, serta terbatasnya perhatian terhadap kebutuhan dan kepentingan strategis perempuan, khususnya dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa masih tergolong rendah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam berbagai

forum formal desa seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan rapat desa lainnya, keterlibatan perempuan masih sangat terbatas. Berdasarkan studi oleh CARE Indonesia (2023), hanya sekitar 18,8% perempuan yang terlibat dalam Musrenbangdes. Bahkan, dalam beberapa kasus, tidak ada satu pun perempuan yang menjadi anggota BPD, sebuah badan yang seharusnya mewakili aspirasi seluruh warga desa, termasuk perempuan.

Kehadiran perempuan dalam forum formal desa sering kali hanya bersifat simbolik. Mereka diundang untuk hadir, tetapi tidak diberikan ruang atau dorongan untuk menyampaikan pendapat. Dalam banyak kasus, perempuan merasa tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum atau dianggap kurang kompeten oleh peserta laki-laki. Penelitian dari Universitas Diponegoro (Putri, 2021) menunjukkan bahwa perempuan yang hadir dalam Musrenbangdes umumnya hanya menjadi peserta pasif tanpa memberikan kontribusi terhadap substansi musyawarah.

Faktor budaya turut memengaruhi rendahnya partisipasi perempuan. Nilai-nilai patriarki yang masih dominan di banyak desa menyebabkan perempuan dianggap lebih pantas mengurus urusan domestik dibandingkan dengan terlibat dalam urusan pemerintahan. Selain itu, kurangnya pelatihan kepemimpinan dan keterampilan komunikasi publik bagi perempuan desa memperparah situasi ini.

2. Kesenjangan Gender dalam Struktur Pemerintahan Desa

Kesenjangan gender dalam struktur pemerintahan desa di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur, masih sangat nyata. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan desa, pada praktiknya jumlah perempuan dalam jabatan strategis seperti kepala desa dan perangkat desa masih sangat minim. Data dari Kementerian Desa dan PDTT (2022) menyebutkan bahwa dari lebih dari 74.000 desa di Indonesia, hanya sekitar 4.120 desa (5,5%) yang memiliki kepala desa perempuan. Di NTT, angka ini bahkan lebih rendah dari rata-rata nasional.

Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam struktur perangkat desa juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Dalam satu kecamatan di Kabupaten Boyolali, misalnya, dari total 261 kepala desa yang terpilih pada Pilkades 2019, hanya satu yang merupakan perempuan (Putri, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam posisi strategis di desa bukan hanya fenomena lokal, tetapi merupakan gejala struktural yang tersebar luas di Indonesia.

Berbagai faktor menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan, mulai dari hambatan budaya, minimnya dukungan dari partai politik dan masyarakat, hingga terbatasnya kapasitas perempuan untuk mengikuti proses politik desa yang kompleks. Perempuan yang memiliki potensi sering kali enggan mencalonkan diri

karena takut akan stigma sosial, serta karena tidak memiliki akses terhadap modal politik dan ekonomi yang memadai.

3. Upaya dari Rendahnya Partisipasi Perempuan

Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di perdesaan Nusa Tenggara Timur (NTT) selama masa kepemimpinan Viktor Laiskodat (2018–2023) mencerminkan ketimpangan gender yang signifikan. Meskipun perempuan di NTT menunjukkan peningkatan dalam sektor profesional, dengan 51,13% bekerja sebagai tenaga profesional pada tahun 2023, mereka masih menghadapi hambatan dalam akses terhadap sumber daya pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di NTT pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,428, menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan memiliki IPM sebesar 67,50, lebih rendah dibandingkan laki-laki yang sebesar 72,25. Ketimpangan ini berdampak pada keterbatasan perempuan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Jumlah penduduk perempuan di NTT pada tahun 2024 mencapai 2.827.853 jiwa, hampir setara dengan jumlah penduduk laki-laki. Namun, kesetaraan jumlah ini belum tercermin dalam representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan di desa. Budaya patriarki yang kuat dan keterbatasan akses terhadap pendidikan menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi aktif perempuan dalam proses pembangunan. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, serta perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender. Dengan demikian, perempuan dapat berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, yang akan berkontribusi pada pembangunan perdesaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Era Viktor Laiskodat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (2018–2023) telah meluncurkan berbagai kebijakan afirmatif untuk mendorong pemberdayaan perempuan desa. Program-program tersebut yakni Program ENVISION: Pemberdayaan BUMDes Berbasis Kesetaraan Gender

Program "Enabling Civil Society for Inclusive Village Economic Development (ENVISION)" merupakan kolaborasi antara Uni Eropa, Wahana Visi Indonesia (WVI), dan Yayasan Alfa Omega (YAO). Dilaksanakan sejak Maret 2020 selama 42

bulan di Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Kupang, program ini bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dan pemuda dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 50 BUMDes didampingi, dengan 42 di antaranya mencapai minimal 20% keterwakilan perempuan dalam manajemen. Sebanyak 12.440 perempuan dan pemuda menjadi penerima manfaat langsung dari total 61.075 orang yang terlibat. Sebanyak 67 fasilitator desa dilatih sebagai tokoh Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI). Lalu, Sebanyak 38 BUMDes memperoleh sertifikat badan hukum, dan 30 BUMDes menerima alokasi dana tambahan dari dana desa sebesar minimal 5%.

Lalu, adanya program Pelatihan Kepemimpinan Perempuan oleh Konsorsium Timor Adil dan Setara (KTAS). KTAS NTT, yang terdiri dari berbagai organisasi seperti CIS TIMOR dan LBH APIK NTT, menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan perempuan di 12 desa dampingan di Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Timor Tengah Utara (TTU). Tujuan dari penelitian ini yaitu meningkatkan pemahaman tentang kepemimpinan perempuan dan konstruksi gender dari aspek sosial budaya, Mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di tingkat desa, Meningkatkan keterampilan dalam penulisan proposal dan strategi advokasi. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan desa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menetapkan Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Manggarai Barat di NTT sebagai wilayah percontohan pengembangan model DRPPA yang bertujuan mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pemerintahan desa dan mengurangi budaya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi di wilayah tersebut.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perkembangan positif dalam kesetaraan gender di NTT seperti Indeks Ketimpangan Gender (IKG) NTT pada tahun 2023 adalah 0,428, menurun dari 0,436 pada tahun 2022. Sebanyak 51,13% perempuan di NTT bekerja sebagai tenaga profesional pada tahun 2023, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun terdapat kemajuan, beberapa tantangan masih dihadapi. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa masih rendah, dipengaruhi oleh faktor struktural seperti pendidikan dan ekonomi, serta faktor kultural yang menempatkan perempuan dalam peran domestik. Tingkat pendidikan perempuan di NTT masih rendah, dengan sebagian besar hanya menyelesaikan pendidikan dasar.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam konteks pembangunan perdesaan di Nusa Tenggara Timur tidak hanya

merupakan persoalan akses, tetapi juga merupakan masalah struktural dan kultural yang saling terkait. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bersifat komprehensif dan kontekstual dalam merespons tantangan ini, baik melalui kebijakan maupun intervensi sosial. Secara praktis, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, perlu memperkuat kapasitas perempuan desa melalui program-program pendidikan politik dan kepemimpinan yang berkelanjutan. Selama ini, minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa tidak hanya disebabkan oleh rendahnya keterwakilan secara formal, tetapi juga karena terbatasnya pengetahuan dan kepercayaan diri perempuan dalam menyuarakan aspirasinya di ruang publik. Oleh karena itu, pelatihan yang dirancang secara partisipatif dan kontekstual menjadi penting untuk membekali perempuan dengan keterampilan advokasi, komunikasi publik, serta pemahaman terhadap sistem pemerintahan desa dan mekanisme penganggaran. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan kuota keterwakilan perempuan dalam struktur lembaga desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia musyawarah desa, serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kehadiran perempuan dalam lembaga-lembaga tersebut tidak boleh hanya bersifat simbolik, tetapi harus didukung dengan ruang aktual untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang responsif gender. Integrasi indikator kesetaraan gender ke dalam dokumen perencanaan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), juga menjadi langkah strategis yang perlu diadopsi oleh setiap pemerintah desa. Lebih jauh, pemberdayaan kelompok-kelompok perempuan yang sudah eksis di tingkat lokal, seperti koperasi perempuan, kelompok tani perempuan, atau Posyandu, perlu direvitalisasi dan diarahkan sebagai wadah pembelajaran dan advokasi kolektif. Kelompok-kelompok ini dapat menjadi basis sosial yang mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin perempuan desa yang memiliki legitimasi komunitas. Di sisi lain, perubahan kultural yang mendalam juga menjadi prasyarat penting dalam membongkar sistem nilai patriarkal yang masih mengakar kuat. Untuk itu, pelibatan tokoh adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lokal dalam kampanye kesetaraan gender menjadi kunci untuk menciptakan transformasi sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dari sisi akademik, penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lebih lanjut mengenai keterkaitan antara efektivitas kebijakan daerah dan dinamika partisipasi perempuan dalam konteks perdesaan. Studi-studi lanjutan sebaiknya mengadopsi pendekatan multidisipliner yang tidak hanya menilai aspek kuantitatif keterwakilan perempuan, tetapi juga mengkaji secara mendalam faktor-faktor kultural, sosial, dan politik yang mempengaruhi tingkat partisipasi mereka. Pendekatan kualitatif yang melibatkan perempuan sebagai partisipan aktif dalam proses penelitian dapat memberikan wawasan lebih kaya mengenai hambatan dan peluang yang ada di lapangan. Selain itu, kajian longitudinal sangat dibutuhkan untuk memantau perkembangan dan dampak jangka panjang dari intervensi kebijakan maupun program pemberdayaan perempuan. Dengan

cara ini, efektivitas kebijakan afirmatif dan strategi pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat dianalisis secara sistematis dan diperbaiki sesuai kebutuhan yang berkembang. Penelitian juga dapat memperluas cakupan wilayah dengan membandingkan kondisi di berbagai kabupaten atau provinsi di Indonesia, sehingga temuan yang diperoleh dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Secara keseluruhan, upaya pemberdayaan perempuan di tingkat desa harus dilihat sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kesetaraan gender sebagai pilar utama. Transformasi sosial dan struktural yang diinisiasi melalui kebijakan dan intervensi yang tepat akan memperkuat kualitas demokrasi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif yang mampu mengarahkan proses pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasi komunitasnya.

Daftar Pustaka

- Abba, Ardy. "Feminisme, Patriarki Dan Partisipasi Perempuan NTT Dalam Ranah Politik." Voxntt.com, VoxNtt.com, 9 Oct. 2024, voxntt.com/2024/10/09/feminisme-patriarki-dan-partisipasi-perempuan-ntt-dalam-ranah-politik/. Accessed 16 Apr. 2025
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2021). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). Statistik Gender Provinsi NTT 2023. Kupang: BPS NTT.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). Statistik Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024, Agustus 6). 51,13% perempuan di NTT bekerja sebagai tenaga profesional. <https://ntt.bps.go.id/id/news/2024/08/06/492/51-13-persen-perempuan-di-ntt-bekerja-sebagai-tenaga-profesional.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024, Agustus 5). Jumlah penduduk perempuan NTT 2024 adalah 2.827.853 jiwa. <https://ntt.bps.go.id/id/news/2024/08/05/482/jumlah-penduduk-perempuan-ntt-2024-adalah-2-827-853-jiwa.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024, Mei 6). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023 sebesar 0,428. <https://ntt.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/1393/indeks-ketimpangan-gender--ikg--provinsi-nusa-tenggara-timur-2023-sebesar-0-428.html>
- CARE Indonesia. (2023). *Suara Perempuan dalam Musyawarah Desa*. <https://careindonesia.or.id>

- Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dalam Mendukung Pembangunan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Harahap, A. R. (2023). Efektivitas Kebijakan Afirmatif dalam Pemberdayaan Perempuan di Wilayah Perdesaan Indonesia Timur. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 45-62.
- Harahap, N. (2023). Evaluasi Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Lokal. *Jurnal Sosial Politik dan Gender*, 11(1), 33-49.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). Laporan Implementasi UU Desa Tahun 2022. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Laporan Pembangunan Manusia Provinsi NTT 2021. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Murdianto, and Umar Al Faaruq. "Hubungan Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Kasus: Perempuan Desa Wisata Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, vol. 8, no. 01, 17 May 2024, pp. 41-55, ejournal-skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm/article/view/1211, <https://doi.org/10.29244/jskpm.v8i01.1211>.
- Mutmainah, S. (2021). Norma Adat dan Hambatan Partisipasi Politik Perempuan di Desa: Studi Kasus di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 39(2), 123-138.
- Mutmainah, S. (2021). Norma Sosial dan Budaya Patriarkal dalam Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Studi Gender dan Pembangunan*, 17(1), 45-56.
- Mutmainah. (2021). Peran Adat dalam Menentukan Representasi Perempuan di Desa NTT. *Jurnal Gender dan Budaya*, 7(1), 45-60.
- Mutmainah. (2021). Perempuan dan Partisipasi dalam Musyawarah Desa: Studi Kasus di NTT. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(2), 145-162.
- Nalle, F.W., Seran, S., & Klau, A.D. (2025). "Gender Dynamics in the Agricultural Sector in the NTT-Timor Leste Border Region." *Jurnal Economia*, 21(1), 81-105.
- Nurjanah, S. (2019). Peran Perempuan dalam Pemerintahan Desa: Studi Implementasi Kebijakan Afirmasi Gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 123-137.
- Pah, T. I. B. K. (2016). Relasi gender dalam menghadapi bencana di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. *NATAPRAJA: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 164-165
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). Rencana pembangunan jangka menengah daerah perubahan (RPJMD-P) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun

- 2018–2023. Diakses dari <https://nttprov.go.id/doc/29082023111119RPJMDPerubahan1.pdf> (diakses pada 21 April 2025)
- Puspitasari, A. (2020). Representasi Simbolik Perempuan dalam Struktur Pemerintahan Desa di Indonesia Timur. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(2), 114–129.
- Puspitasari, D. (2020). Representasi Perempuan dalam Struktur Pemerintahan Desa: Antara Simbolisme dan Realitas. *Jurnal Politik Lokal*, 8(3), 89–104.
- Putri, D. M. A. (2021). *Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Sawit*. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan*, Universitas Diponegoro. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/28177> (Diakses pada 23 Mei 2025)
- Ramadhani, F., et al. (2022). Pendidikan dan Literasi Politik Perempuan di Kawasan 3T: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 14(4), 221–237.
- Ramadhani, F., Nurhidayati, L., & Luhur, D. R. (2022). Akses Pendidikan dan Partisipasi Politik Perempuan di Kawasan 3T. *Jurnal Ketimpangan Sosial*, 8(1), 88–103.
- Susanti, H., & Lestari, P. (2021). Perempuan dan Kesenjangan Keterwakilan dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Gender*, 5(2), 57–71.
- Susanti, N. & Lestari, D. (2021). Partisipasi Politik Perempuan di Wilayah Timur Indonesia: Hambatan dan Strategi. *Jurnal Studi Gender dan Pembangunan*, 9(1), 35–50.
- Syamsiyah, N., & Handayani, S. (2020). Akses Perempuan terhadap Aset Produktif di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 117–130.
- Syamsiyah, S., & Handayani, S. (2020). Kepemilikan Aset dan Partisipasi Perempuan dalam Politik Lokal di Indonesia Timur. *Jurnal Studi Pembangunan*, 18(3), 201–219.
- Tokan, Frans Bapa, and Apolonaris Gai. "PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi Tentang Relasi Kuasa Dan Akses Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur)." *Jurnal Caraka Prabhu*, vol. 4, no. 2, 1 Dec. 2020, pp. 213–234, <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>.
- UNDP Indonesia. (2021). *Laporan Pembangunan Manusia: Fokus pada Kesenjangan Gender*. Jakarta: UNDP.
- Wahyuni, D. (2022). Peran Ganda Perempuan Petani di Nusa Tenggara Timur: Studi Kasus di Desa Sumba Barat. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, 10(2), 65–73.
- Wahyuni, D. (2022). Perempuan, Beban Ganda, dan Eksklusi Politik di Desa. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, 5(2), 23–37.
- Wahyuni, I. (2022). Beban Ganda Perempuan dan Partisipasi Politik di Desa. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(2), 76–90.
- Wahyuni, S. (2022). Ketimpangan Ekonomi Gender di Perdesaan NTT. *Jurnal Ekonomi dan Gender*, 10(1), 33–47.

- Wulandari, R. (2019). Literasi Politik dan Peran Perempuan dalam Pemerintahan Desa di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 11(1), 77-93.
- Wulandari, S. (2019). Hambatan Literasi Politik Perempuan di Wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Politik Lokal*, 3(1), 78–94.
- Wulandari, T. (2019). Hambatan Pendidikan dan Literasi Politik Perempuan di Desa-Desa Indonesia Timur. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 7(1), 55-70.
- Yuliana, R., & Prasetyo, A. (2023). Invisibilitas Peran Perempuan dalam Tata Kelola Ekonomi Desa. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 10(1), 44–58.
- Yuliana, R., & Prasetyo, E. (2023). Peran Kelompok Tani Perempuan dalam Pembangunan Desa: Studi di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Agraria dan Pembangunan Wilayah*, 12(1), 99-115.